

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat bersamaan dengan jumlah penduduk, memicu peningkatan aktivitas ekonomi, dan kompleksitas kebutuhan manusia sehingga menimbulkan konsekuensi terhadap lingkungan (Gho & Satria, 2024). Hal ini tercermin pada peningkatan gaya hidup konsumtif masyarakat yang cenderung mengabaikan dampak jangka panjang sehingga mendorong berbagai dampak negatif pada lingkungan di masa depan, seperti pencemaran dan degradasi lingkungan (Wahdatunnisa, 2019). Kondisi ini menekankan pada peran pentingnya pengelolaan lingkungan yang baik dan bijaksana.

Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 28 ayat (1) tentang Hak dan Kesejahteraan Masyarakat menyatakan bahwa *setiap orang memiliki hak yang setara untuk menikmati menikmati kehidupan yang layak*. Regulasi tersebut memberikan landasan hukum yang kuat bahwa pemerintah berkewajiban untuk mengelola lingkungan hidup, antara lain pemanfaatan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian tata ruang lingkungan hidup (Herlina, 2015).

Pemerintah sebagai *leading sector* berkewajiban untuk mengelola lingkungan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang telah disampaikan dalam tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu membangun masa depan yang lebih baik dengan menyeimbangkan pertumbuhan

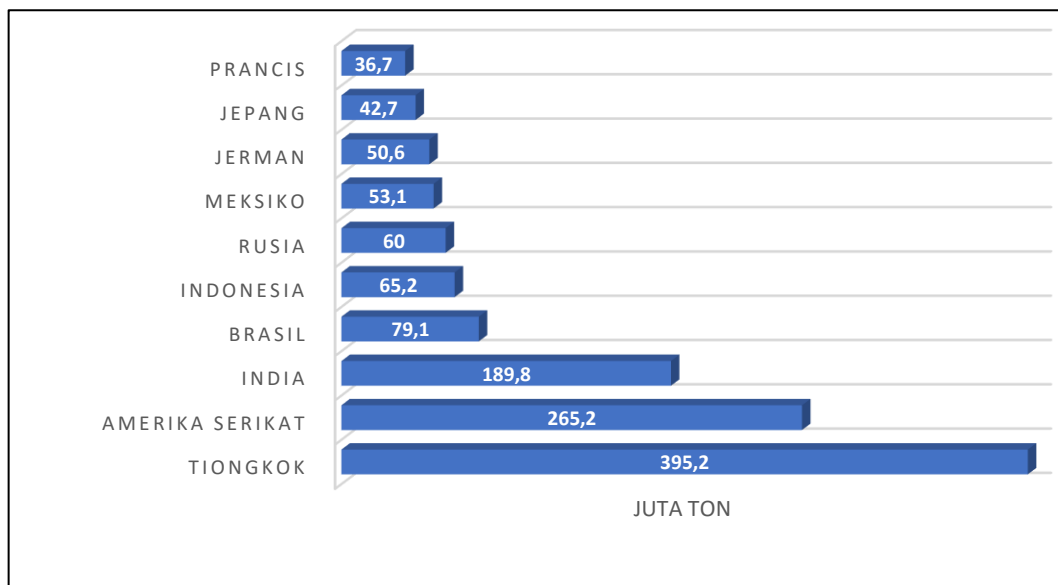
ekonomi, inklusi sosial, dan perlindungan lingkungan. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan yang mampu menjaga peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk generasi sekarang dan mendatang (Rudiyanto, 2019).

Seluruh pilar SDGs memiliki keterkaitan erat dengan isu lingkungan yang di dalamnya berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, dan produksi yang bertanggung jawab (Vicky Hapsari et al., 2023). Komponen tersebut merupakan kunci dalam mencapai tujuan berkelanjutan. Namun, terdapat tantangan besar yang seringkali menghantui, yakni permasalahan lingkungan terutama dalam hal sampah. Sebagaimana pengertian sampah menurut Azwar (1995) dalam Hardiyanti & Priyadi (2020) yaitu sebagai material yang tidak memiliki nilai guna dan dibuang oleh pemiliknya tetapi dapat bernilai manfaat bagi sebagian orang apabila diolah dengan cara yang tepat.

Wahdatunnisa (2019) menjelaskan sampah merupakan isu kompleks yang mempengaruhi berbagai sektor dan mengancam pada tiga pilar pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, pengelolaan sampah yang berkelanjutan memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian tujuan SDGs. Kondisi ini semakin menegaskan urgensi pengelolaan sampah yang efektif, terutama di wilayah perkotaan khususnya di negara-negara berkembang dengan tingkat pendapatan rendah hingga menengah (Hoornweg & BhadaTata, 2017).

Situasi pengelolaan sampah menjadi perhatian utama akibat pertumbuhan populasi cepat, arus urbanisasi pesat, dan meningkatnya tingkat konsumsi. Hal tersebut saling berhubungan dan berpotensi memperburuk masalah lingkungan

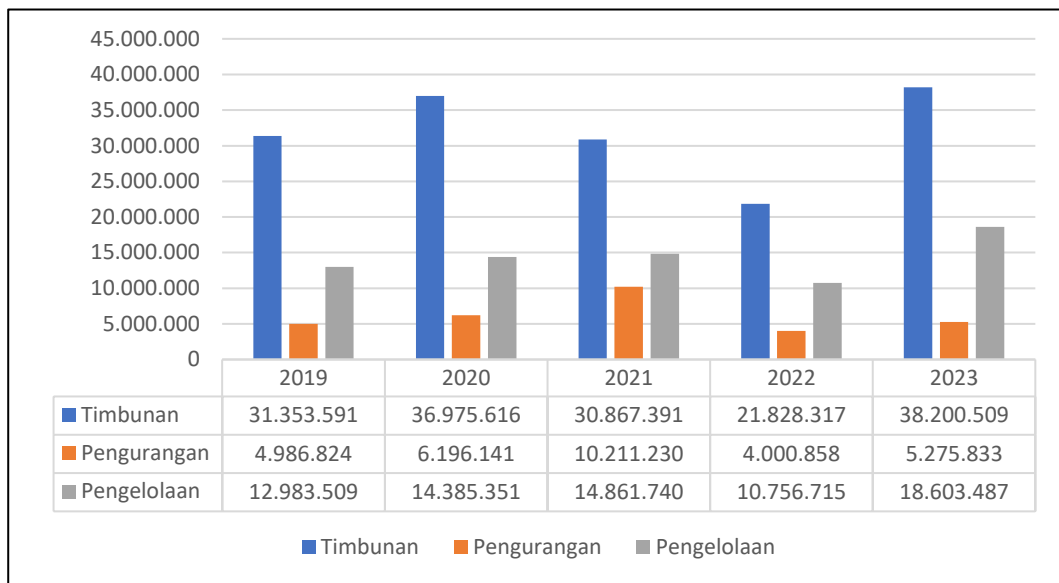
serta kesehatan, sekaligus menghambat upaya pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang (Fia Rahmawati & Dola Syamsu, 2021). Indonesia sebagai salah satu negara berkembang turut menghadapi permasalahan sampah yang semakin mengkhawatirkan dan memerlukan solusi pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.



Gambar 1.1. Negara Penghasil Sampah Terbesar di Dunia

Sumber: World Bank, Telah Diolah Kembali (2020)

Merujuk pada Gambar 1.1. diatas, menunjukkan bahwa pada tahun 2020, Indonesia menjadi negara penghasil sampah terbesar keenam dengan timbulan sampah sekitar 65,2 juta ton. Posisi ini berada di bawah Tiongkok (395,2 juta ton), Amerika Serikat (265,2 juta ton), India (189,8 juta ton), dan Brasil (79,1 juta ton). Negara-negara lain, seperti Rusia, Meksiko, Jerman, Jepang, dan Prancis memiliki produksi sampah yang lebih rendah dibandingkan Indonesia. Tingginya produksi sampah di Indonesia mencerminkan tantangan besar dalam pengelolaan sampah yang mencakup pada aspek pengurangan dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.



Gambar 1.2. Hasil Capaian Pengelolaan Sampah Indonesia pada Tahun 2019-2023

*Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN),
Telah Diolah Kembali (2024)*

Berdasarkan Gambar 1.2. di atas, menunjukkan bahwa timbunan sampah di Indonesia terus mengikuti tren peningkatan secara konsisten yang mencapai 38,3 juta ton pada tahun 2023 yang mencerminkan lemahnya tindakan preventif di hulu. Pengurangan sampah menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Capaian tertinggi tertinggi terjadi pada tahun 2021 (10,2 juta ton), tetapi menurun drastis pada tahun 2022 (4 juta ton). Hal tersebut mengindikasikan ketidakkonsistenan implementasi program pengurangan sampah yang meliputi upaya *reduce*, *reuse*, dan *recycle*. Di sisi lain, pengelolaan sampah yang mencakup pemrosesan akhir, seperti pembakaran terkontrol, daur ulang skala industri, dan konversi energi mengalami peningkatan dari 12,9 juta ton (2019) menjadi 18,6 juta ton (2023). Namun, peningkatan ini belum sebanding dengan lonjakan timbunan sampah sehingga hanya 48,7% sampah yang terkelola pada tahun 2023. Artinya, lebih dari separuh sampah (51,3%) masih dibuang di TPA dengan metode konvensional.

Berdasarkan hal tersebut, upaya pengendalian dan pengelolaan sampah sejauh ini terbilang belum optimal, terbukti dari adanya peningkatan volume timbunan sampah yang terjadi di seluruh provinsi di Indonesia.

Tabel 1.1. Provinsi Penghasil Timbunan Sampah Terbesar di Indonesia Tahun 2023

No.	Provinsi	Jumlah Timbunan Sampah (Ton)
1.	Jawa Timur	3.790.869
2.	Jawa Tengah	3.527.050
3.	Jawa Barat	2.077.900
4.	DKI Jakarta	1.571.077
5.	Sulawesi Selatan	933.224

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), (2023)

Berdasarkan Tabel 1.1. di atas, menunjukkan bahwa pada tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah menjadi penghasil timbunan sampah terbesar kedua di Indonesia (3,5 juta ton) setelah Provinsi Jawa Timur (3,7 juta ton). Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Sulawesi Selatan masing-masing menempati peringkat ketiga, keempat, dan kelima secara berurutan. Salah satu faktor tingginya timbunan sampah di Provinsi Jawa Tengah yaitu provinsi ini termasuk dalam lima besar provinsi dengan populasi tertinggi di Indonesia yang mencapai 36,8 juta jiwa (Aulia Putra & Dianta, 2024). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa total populasi Indonesia sekitar 277 juta jiwa pada tahun 2023 maka penduduk dari Provinsi Jawa Tengah menyumbang sekitar 13,3% dari total populasi nasional.

Tingginya jumlah timbunan sampah di provinsi-provinsi besar, termasuk Jawa Tengah mencerminkan tantangan nasional dalam pengelolaan sampah, terutama di daerah dengan jumlah penduduk tinggi (Yolanda Pramesti et al., 2023). Hal ini menuntut adanya sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif agar dampak lingkungan dan kesehatan dapat diminimalisir. Dalam upaya menangani

permasalahan ini, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengelola sampah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Regulasi ini dirancang untuk memastikan pengelolaan sampah yang efektif di setiap wilayah administrasi, guna meningkatkan kualitas lingkungan serta kesehatan masyarakat.

Kabupaten Cilacap merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah terbesar dan dikenal sebagai kawasan industri strategis yang menampung berbagai sektor manufaktur serta energi. Aktivitas ekonomi tinggi yang tinggi, kepadatan penduduk, serta keberadaan kawasan industri turut berkontribusi terhadap peningkatan volume sampah yang dihasilkan setiap tahunnya (Hanifah & Buchori, 2023).

Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (Jiwa) Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Semarang	1.814.110	1.653.524	1.656.564	1.659.975	1.694.743
Kabupaten Brebes	1.809.096	1.978.759	1.992.685	2.010.617	2.043.077
Kabupaten Cilacap	1.727.098	1.944.857	1.963.824	1.988.622	2.007.829
Kabupaten Banyumas	1.693.006	1.776.918	1.789.630	1.806.013	1.828.573
Kabupaten Grobogan	1.377.788	1.453.526	1.460.873	1.470.150	1.492.891
Kabupaten Tegal	1.440.698	1.596.996	1.608.611	1.623.595	1.654.836
Kabupaten Pati	1.259.590	1.324.188	1.330.983	1.339.572	1.359.364

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, Telah Diolah Kembali (2023)

Berdasarkan Tabel 1.2. di atas, menunjukkan bahwa Kabupaten Cilacap menempati urutan ketiga kabupaten/kota dengan angka jumlah penduduk tertinggi dalam lima tahun terakhir di Jawa Tengah setelah Kota Semarang dan Kabupaten

Brebes. Merujuk pada Lavany (2022) dalam penelitiannya yang menyebutkan bahwa peningkatan jumlah penduduk dapat berdampak pada peningkatan sampah yang diakibatkan kurangnya kesadaran tentang pengelolaan sampah. Tingginya jumlah penduduk berkaitan erat dengan pengelolaan sampah, jika tidak disertai pola hidup yang baik akan memberikan dampak pada meningkatnya barang-barang yang menghasilkan sampah.

Padatnya penduduk dapat berimbas pada pengelolaan sampah dengan terbatasnya tempat yang digunakan sebagai fasilitas dalam pengelolaan sampah, adanya kelangkaan lahan yang digunakan sebagai sarana pembuangan sampah serta tingginya biaya yang digunakan dalam pengelolaan sampah tidak sebanding dengan kebutuhan layanan sampah yang semakin meningkat (Apriliani & Maesaroh, 2021). Berdasarkan hal tersebut, jumlah penduduk yang semakin meningkat tidak mengherankan jika Kabupaten Cilacap sebagai salah satu penyumbang penghasil sampah di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data yang ada, Kabupaten Cilacap tercatat sebagai salahsatu penyumbang timbunan sampah terbesar di tingkat kabupaten se-Jawa Tengah selama periode 2019-2021 (SIPSN, 2023) sebagaimana yang disajikan dalam Tabel 1.3.

Tabel 1.3. Jumlah Timbunan Sampah Terbesar Tingkat Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021

Kabupaten	Timbulan Sampah Tahunan (ton/tahun)		
	Tahun		
	2019	2020	2021
Kab. Tegal	370.970,80	371.778,31	244.819,49
Kab. Brebes	330.160,02	361.123,52	358.865,26
Kab. Cilacap	333.228,30	343.019,17	344.409,04
Kab. Jepara	251.072,20	254.418,30	146.028,40
Kab. Magelang	248.383,34	248.530,33	248.800,43

Kabupaten	Timbulan Sampah Tahunan (ton/tahun)		
	Tahun		
	2019	2020	2021
Kab. Sragen	194.447,69	195.023,44	213.952,27
Kab. Semarang	192.320,00	194.690,09	192.189,00
Kab. Pati	182.981,65	239.060,58	241.664,31
Kab. Temanggung	181.154,69	181.143,80	182.562,96
Kab. Wonogiri	159.359,58	159.663,85	160.369,61

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), Telah Diolah Kembali (2023)

Berdasarkan tabel 1.3. dapat diperoleh informasi bahwa Kabupaten Cilacap secara konsisten menempati posisi tiga teratas setelah Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal dengan jumlah timbulan sampah mencapai 344.409 ton (2021). Berbeda dengan kondisi di Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes yang menunjukkan adanya tren penurunan timbulan sampah. Hal ini menunjukkan adanya indikasi lemahnya sistem pengendalian dan pengelolaan sampah di Kabupaten Cilacap. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan tindakan preventif dan represif guna mengurangi timbulan sampah khususnya di Kabupaten Cilacap.

Kabupaten Cilacap menghadapi permasalahan serius dalam pengelolaan sampah akibat *over capacity* pada Tempat pembuangan Akhir (TPA) sampah (Maghfuri & Nugroho, 2024). Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap, volume sampah yang dihasilkan mencapai 300 ton/hari. Dari total sampah tersebut, sekitar 80% (240 ton/hari) diangkut ke TPA. Sementara 20% terakumulasi di lingkungan permukiman atau dibuang secara ilegal (Ibtisamah, 2022). Ketergantungan pada sistem TPA konvensional dengan metode *open dumping* tidak lagi *feasible* untuk mengendalikan laju timbulan sampah yang terus meningkat (Hendra, 2016). Dilansir dari Kompas.com TPA Kabupaten Cilacap

diprediksi akan *overload* pada tahun 2025 yang apabila tidak beralih ke sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan maka akan menghadapi bencana lingkungan. Sebagaimana yang diungkapkan dalam penelitian Hendra (2016), kondisi ini mencerminkan ketidakseimbangan antara kapasitas pengelolaan sampah dengan volume sampah yang terus bertambah sehingga menjadi tantangan utama dalam sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Cilacap.

Diperlukan solusi untuk menangani masalah persampahan di Kabupaten Cilacap, dimulai dari sumbernya yaitu menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membuang dan mengelola sampah serta pemerintah perlu menyediakan infrastruktur dan mengadakan program pengelolaan sampah yang komprehensif untuk penanganan timbulan sampah. Di sisi lain, Pemerintah Indonesia tengah gencar mengembangkan energi terbarukan sebagai upaya mengatasi krisis energi fosil. Langkah ini dilakukan untuk mendorong transisi dari penggunaan bahan bakar fosil ke Energi Baru dan Terbarukan (EBT), mengingat cadangan energi fosil yang semakin menipis akibat tingginya tingkat konsumsi masyarakat. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, yang menetapkan target bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) minimal 23% pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 31% pada tahun 2050.

Kabupaten Cilacap menjadi salah satu daerah yang dipilih sebagai *pilot project* dalam pengolahan sampah berbasis *Waste to Energy* (WtE) melalui teknologi *Refuse Derived Fuel* (RDF). Pemilihan ini didasarkan pada potensi volume sampah yang cukup besar serta lokasi strategisnya yang berdekatan dengan industri semen sebagai *offtaker* utama RDF. Data dari BPSDM PU tahun 2019

menunjukkan bahwa potensi pengembangan WtE di Indonesia mencapai 1.879,50 MW, dengan potensi terbesar berada di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, dan Banten sebesar 712 MW. Pulau Jawa memiliki potensi terbesar dibandingkan dengan pulau lainnya (Kompasiana.com, 2021). Pengembangan teknologi RDF di Kabupaten Cilacap menjadi pilihan strategis karena potensi volume sampah yang dihasilkan di wilayah ini cukup tinggi. Dengan adanya RDF, sampah yang sebelumnya hanya berakhir di TPA kini dapat dikonversi menjadi bahan bakar alternatif bagi industri. Hal ini tidak hanya berkontribusi pada pengurangan timbulan sampah, tetapi juga mendukung kebijakan nasional dalam pemanfaatan energi terbarukan.

Dikutip dari Purnaweni (2004) dalam Margi Yusmaman et al., (2023), menjelaskan sampah di perkotaan menjadi salah satu sumber utama pencemaran dan tantangan kompleks yang harus dihadapi oleh para birokrat dalam pengelolaan publik. Dalam upaya percepatan transisi menuju energi terbarukan dan pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan, sebagian besar infrastruktur Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Indonesia dikembangkan melalui pendekatan kerja sama kolaboratif antar aktor yang menekankan pentingnya sinergitas multi-*stakeholder* atau pendekatan *collaborative governance*.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 6 huruf (g) tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah daerah memiliki tugas untuk melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan aktor lain agar tercipta keterpaduan dalam pengelolaan sampah. Hal ini menegaskan bahwa pengelolaan sampah yang efektif tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan

membutuhkan kerja sama lintas aktor untuk menciptakan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Bupati Nomor 233 Tahun 2018 Pasal 8 Ayat 2 huruf (i) menekankan pentingnya penguatan keterlibatan dunia usaha dan aktor di luar pemerintahan melalui kolaborasi dan strategi pengelolaan sampah terpadu berbasis teknologi RDF.

Unsur utama yang berperan penting dalam pelaksanaan pengelolaan sampah terpadu berbasis teknologi RDF di Kabupaten Cilacap adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cilacap sebagai regulator utama yang bertanggung jawab atas kebijakan dan pengelolaan sampah. Selain itu, terdapat peran PT Solusi Bangun Indonesia (SBI) sebagai operator sekaligus *offtaker* RDF yang memanfaatkan bahan bakar alternatif ini dalam industri semen. Tidak hanya itu, keterlibatan komunitas lokal dan akademisi juga memainkan peran penting dalam memberikan edukasi serta mendorong riset terkait inovasi pengelolaan sampah yang lebih efektif. Dengan adanya pendekatan *collaborative governance*, setiap aktor memiliki peran dan kontribusi yang saling melengkapi dalam mendukung keberlanjutan program ini. Namun, sejauh ini dalam implementasi kolaborasi masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks.

Direktur Pengelolaan Sampah KLHK, Novrizal Tahar, mengungkapkan bahwa alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah di tingkat kabupaten/kota rata-rata hanya berkisar 0,05-0,07% dari total APBD, angka yang masih tergolong sangat rendah. Terbatasnya anggaran ini menjadi salah satu kendala utama dalam pengelolaan sampah berbasis RDF, ditambah dengan masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya tata kelola teknologi sampah berkelanjutan

(Rachman et al., 2020). Berdasarkan hal tersebut, skema kerja sama yang diajukan menggunakan *sharing cost*, yaitu mekanisme pembagian biaya antara pemerintah daerah dan PT Solusi Bangun Indonesia (SBI) dalam pengelolaan sampah berbasis RDF. Namun, dalam implementasinya pada tahun kedua, muncul perbedaan pendapat mengenai pembagian pembiayaan, terutama terkait dengan aspek operasional RDF yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam skema awal kerja sama (Maghfuri & Nugroho, 2024).



Gambar 1.3. Penandatanganan Pembaharuan Kerja Sama Melalui Addendum

Sumber: Times Indonesia.com (2021)

Berdasarkan gambar 1.3. di atas, dapat dilihat adanya proses penandatanganan pembaharuan kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dan PT Solusi Bangun Indonesia (SBI). Pembaharuan ini dilakukan sebagai respons terhadap berbagai tantangan yang muncul dalam kolaborasi pengelolaan sampah berbasis RDF, terutama dalam aspek pembiayaan dan keberlanjutan operasional. Ketidaksepakatan dalam pembagian pembiayaan menjadi salah satu faktor utama yang memicu konflik, di mana pemerintah daerah merasa terbebani

dengan tanggung jawab biaya yang cukup besar, sementara PT SBI membutuhkan kepastian pasokan RDF dengan kualitas yang sesuai standar industri. Hal ini menjadi hambatan dalam keberlanjutan kolaborasi pengelolaan sampah terpadu berbasis teknologi RDF karena tanpa kejelasan dalam mekanisme pembiayaan dan kesepakatan kerja sama yang konkret, operasionalisasi RDF di Cilacap tidak dapat berjalan optimal.

Pemenuhan hak dan kewajiban dalam kerja sama kolaborasi tidak sepenuhnya terlaksana, yang menyebabkan ketidaksampaian komitmen dalam transfer ilmu terkait pengoperasionalan RDF. Salah satu aspek utama yang tidak terealisasi adalah kewajiban pemerintah dalam mengirimkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengikuti program pelatihan dan pembelajaran teknis yang telah disepakati dalam perjanjian awal. Kegiatan transfer ilmu yang seharusnya menjadi bagian dari Perjanjian Kerjasama (PKS) guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) justru tidak berjalan secara optimal (Arkasiwi, 2024).

POSISI/JABATAN	KONDISI SAAT INI	PIHAK I	PIHAK II	TAMBAHAN TENAGA PENDAMPING (PIHAK I)
<i>Team Leader</i>	1		1	1
<i>Safety</i>	1		1	1
<i>RDF Operator</i>	3		3	3
<i>Mechanic Leader</i>	1		1	1
<i>Electrical Leader</i>	1	1	1	
<i>Hydraulic Leader</i>	1		1	
<i>Mechanic Member</i>	4	1	4	
<i>Electrical Member</i>	2		2	
<i>Hydraulic Member</i>	2		2	
<i>Administration Staff</i>	1		1	
<i>Lab Analyst</i>	1	1		
<i>Lab Sampling</i>	1			
<i>Helper</i>	6		6	
<i>Office Boy</i>	1		1	
<i>Security</i>	6	6		
Operator Alat Berat	7	7		
Operator Jembatan Timbang	2	2		

Gambar 1.4. Daftar Kebutuhan Operasional RDF
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap, (2024)

Merujuk gambar 1.4. di atas, menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan operasional RDF, khususnya dalam aspek pengiriman SDM untuk mengikuti pelatihan dan transfer ilmu. Hal ini mencerminkan bahwa proses kolaboratif dalam kerja sama pengelolaan RDF belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Berdasarkan hal tersebut, terdapat indikasi komitmen belum terealisasi secara penuh sehingga sinkronisasi peran antar *stakeholders* dalam kerja sama tidak tercapai. Kegagalan dalam mengimplementasikan transfer ilmu ini menunjukkan bahwa mekanisme komunikasi, koordinasi, dan pembagian peran antara pihak-pihak yang terlibat masih belum efektif yang pada akhirnya berdampak pada kepercayaan antar *stakeholders* dapat melemah yang berisiko menghambat efektivitas dan keberlanjutan kolaborasi dalam pengelolaan sampah berbasis RDF.

Situasi tersebut menuntut adanya kegiatan pertemuan rapat pertemuan evaluasi menyeluruh guna mencapai solusi bersama. Penelitian yang dilakukan oleh Febiola (2023) menyebutkan pelaksanaan kerjasama antar aktor terhambat karena kurangnya komunikasi antar *stakeholders* melalui rapat evaluasi. Hal tersebut, menciptakan kesenjangan pada pola komunikasi dalam pengambilan keputusan. Sebagaimana yang diungkapkan dalam penelitian Febiola (2023), menunjukkan minimnya intensitas pertemuan antar aktor serta belum adanya pola rapat dan koordinasi yang terstruktur. Hal ini juga didukung dengan tidak adanya regulasi khusus yang mengatur mekanisme evaluasi dan koordinasi secara berkelanjutan sehingga menghambat sinergi antar aktor dalam mencapai tujuan bersama.

Fenomena di atas tidak terlepas dari adanya permasalahan dalam proses kolaborasi. Banyaknya permasalahan dalam pelaksanaan proses kolaborasi

pengelolaan sampah terpadu berbasis teknologi RDF di Kabupaten Cilacap di atas antara lain seperti minimnya intensitas pertemuan, kurangnya upaya membangun kepercayaan, lemahnya komitmen, serta belum tercapainya pemahaman bersama, menunjukkan adanya kesenjangan dalam implementasi *collaborative governance*. *Research question* dalam penelitian ini adalah **“Mengapa proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah terpadu berbasis teknologi RDF di Kabupaten Cilacap belum berjalan optimal?”**.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menekankan terkait urgensi proses *collaborative governance* terutama dalam pengelolaan sampah. Penelitian yang dilakukan oleh Abdulai et al. (2024), Zhang & Zhu (2022), dan Saptawan (2024) menunjukkan temuan serupa yang menegaskan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan sampah. Hasil penelitian tersebut juga menegaskan bahwa pencapaian tujuan dalam pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab aktor pemerintah saja tetapi membutuhkan keterlibatan sektor lain. Penelitian yang dilakukan Yustika & Hertati (2023) menyoroti pentingnya kolaborasi pengelolaan sampah menggunakan pendekatan keberlanjutan berbasis energi yang melibatkan aktor pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam model *triple helix*. Namun, pendekatan ini masih memiliki keterbatasan dalam cakupan aktor yang terlibat. Beberapa penelitian menemukan bahwa pengelolaan sampah masih menghadapi berbagai tantangan. Karlsson et al. (2024) mengungkapkan bahwa pendekatan *top-down* dalam pengelolaan sampah masih menjadi hambatan karena lemahnya kepercayaan antar aktor yang menyebabkan kolaborasi tidak berjalan optimal. Sianturi & Indarto

(2024) menemukan bahwa rendahnya intensitas pertemuan serta lemahnya komitmen antar aktor menyebabkan implementasi kolaborasi tidak berjalan optimal.

Berdasarkan hasil kajian literatur tersebut, sejumlah penelitian terdahulu masih terbatas dalam membahas pengelolaan sampah secara umum dan belum menyentuh pengelolaan sampah berbasis teknologi yang bersifat berkelanjutan. Berdasarkan hasil beberapa kajian literatur di atas, merupakan hal yang menarik untuk mengkaji secara mendalam terkait proses *collaborative governance* pengelolaan sampah terpadu berbasis teknologi RDF di Kabupaten Cilacap. Hasil tinjauan literatur menunjukkan bahwa belum terdapat penelitian yang secara spesifik membahas pengelolaan sampah berbasis teknologi RDF dari sisi proses *collaborative governance* yang melibatkan aktor-aktor dengan peran yang lebih beragam. Hal tersebut diperkuat fakta bahwa pengelolaan sampah berbasis teknologi RDF memiliki kompleksitas tersendiri karena melibatkan teknologi pemrosesan sampah menjadi bahan bakar alternatif serta membutuhkan koordinasi yang erat dengan berbagai pemangku kepentingan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berusaha mengisi kesenjangan dengan menganalisis bagaimana proses *collaborative governance* yang telah dilaksanakan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi proses kolaborasi dalam model *multi-stakeholder*. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini berjudul **“Proses *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Teknologi *Refuse Derived Fuel* (RDF) di Kabupaten Cilacap”**.

1.2. Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, sejumlah identifikasi masalah dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Minimnya intensitas pertemuan antar aktor serta belum adanya pola rapat dan koordinasi yang terstruktur.
2. Ketidaksepakatan dalam skema pembiayaan dan mekanisme kerja sama antar *stakeholders*.
3. Ketidaksampaian komitmen antar *stakeholders* dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).
4. Pelaksanaan pengelolaan sampah terpadu berbasis RDF masih didominasi oleh aktor pemerintah dan swasta, sementara keterlibatan serta sinergi dengan *stakeholders* lainnya belum optimal.
5. Meskipun telah ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai *legal foundation* tetapi mekanisme pelaksanaan kolaborasi dalam pengelolaan sampah terpadu berbasis teknologi RDF belum terjalin secara jelas, sehingga peran dan partisipasi *stakeholders* dalam implementasinya masih lemah.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah, peneliti menyusun beberapa rumusan permasalahan yang dirancang dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah terpadu berbasis teknologi *Refuse Derived Fuel* (RDF) di Kabupaten Cilacap?

2. Apa saja faktor penghambat dari proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah terpadu berbasis teknologi *Refuse Derived Fuel* (RDF) di Kabupaten Cilacap?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan, peneliti merumuskan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah terpadu berbasis teknologi *Refuse Derived Fuel* (RDF) di Kabupaten Cilacap.
2. Menganalisis faktor penghambat dari proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah terpadu berbasis teknologi *Refuse Derived Fuel* (RDF) di Kabupaten Cilacap.

1.4. Kegunaan Penelitian

Terdapat beberapa kegunaan penelitian meliputi (1) Kegunaan Praktis; dan (2) Kegunaan Teoritis yang masing-masing dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Instansi terkait, Penelitian diharapkan bisa menjadi bahan rujukan dan solusi bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap dalam menghadapi permasalahan terkait proses *collaborative governance*;
- b. Bagi Masyarakat, Penelitian diharapkan bisa menjadi peluang atau solusi terbaik untuk memecahkan masalah sosial dan dapat

menganalisis gambaran fenomena sosial yang ada di masyarakat terutama terkait proses *collaborative governance*;

- c. Bagi penelitian yang akan datang, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam gambaran dan pengembangan teori tentang implementasi *collaborative governance* terutama dalam kolaborasi antar aktor agar menjadi lebih optimal.

1.4.2. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik terkait pemikiran akademis dalam menganalisis proses *collaborative governance*;
- b. Penelitian dapat dijadikan bahan dalam peningkatan dan perbaikan dalam proses *collaborative governance* baik secara umum maupun secara khusus dalam kasus pengelolaan sampah;
- c. Sebagai sumber referensi tambahan dalam pembuatan atau penyusunan penelitian sejenis.

1.5. Kerangka Teori

Peneliti mengemukakan hasil penelitian sebelumnya (*State of the Art*) yang relevan dengan topik penelitian, dalam bagian ini dipaparkan kontribusi penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian peneliti yaitu proses *collaborative governance*. Hasil pemaparan dalam bentuk uraian kemudian dianalisis oleh peneliti guna menemukan celah atau *gap* penelitian-penelitian terdahulu serta *novelty* penelitian. Adapun uraian dari beberapa penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 1.4. *State of the Art* sebagai berikut.

Tabel 1.4. *State of the Art*

No	Nama Peneliti, Judul Artikel, Tahun Penerbitan	Tujuan Penelitian	Teori/Model yang Dipakai, Tipe Penelitian, Teknik Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
1.	Peneliti: Ibrahim Abu Abdulai, Moses Naiim Fuseini, Dramani Juah M-Buu File Judul Artikel: <i>Making Cities Clean With Collaborative governance Of Solid Waste Infrastructure In Ghana</i> Tahun: 2024	Menganalisis tata kelola kolaboratif infrastruktur limbah padat di Ghana.	Teori: <i>Collaborative governance</i> Model: Ansell dan Gash Tipe Penelitian: Deskriptif, kualitatif	1. Upaya kolaboratif yang dilakukan di Ghana berjalan positif sehingga meningkatkan kebersihan lingkungan, pembangunan infrastruktur, dan menciptakan peluang kerja bagi masyarakat. 2. Terdapat kendala yaitu kurangnya transparansi akuntabilitas terkait pengaturan <i>pay-as-you</i> .	Perbedaan terletak pada judul penelitian, masalah, tujuan, dan lokus penelitian.
2.	Peneliti: Virginie Arantes, Can Zou, Yue Che Judul Artikel: <i>Coping With Waste: A Government-NGO Collaborative</i>	Menganalisis kolaborasi antara peran pemerintah, LSM, dan masyarakat dalam mengatasi limbah di Shanghai.	Teori: <i>Collaborative governance</i> Model: Ansell dan Gash Tipe Penelitian:	1. Proses kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah, LSM, dan masyarakat di Shanghai dalam mengatasi limbah berjalan optimal. 2. Peran LSM menjadi aktor penting dalam proses kolaborasi ini karena sebagai	Perbedaan terletak pada judul penelitian, tujuan, teknik penelitian, dan lokus penelitian.

No	Nama Peneliti, Judul Artikel, Tahun Penerbitan	Tujuan Penelitian	Teori/Model yang Dipakai, Tipe Penelitian, Teknik Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
	<i>governance Approach In Shanghai</i> Tahun: 2020		Etnografi dan statistik deskriptif ,campuran eksploratif	perantara antara pemerintah dan masyarakat.	
3.	Peneliti: Anna Karlsson, Luis Andres Guillen, Vilis Brukas Judul Artikel: <i>Regional Forest Green Infrastructure Planning And Collaborative governance: A Case Study From Southern Sweden</i> Tahun: 2024	Menganalisis tata kolaboratif program infrastruktur hijau hutan regional di Swedia.	Teori: <i>Collaborative governance</i> Model: Ansell dan Gash Tipe Penelitian: Deskriptif, kualitatif	1. Proses kolaborasi yang dilakukan telah berjalan tetapi sebagai proses jangka panjang. 2. Kelemahan pada kolaborasi ini yaitu pendekatan <i>top-down</i> dengan sumber daya yang tidak mencukupi dan gagal mengatasi kepercayaan. 3. Kurangnya inklusivitas dan dan musyawarah melemahkan legitimasi proses kolaboratif.	Perbedaan terletak pada judul penelitian, tujuan, dan lokus penelitian.
4.	Peneliti: Rebecca McNaught Judul Artikel:	Menganalisis <i>collaborative governance</i> pembangunan	Teori: <i>Collaborative governance</i> Model:	1. Tata kelola kolaboratif sangat penting dalam membangun ketahanan	Perbedaan terletak pada judul penelitian, tujuan, dan lokus penelitian.

No	Nama Peneliti, Judul Artikel, Tahun Penerbitan	Tujuan Penelitian	Teori/Model yang Dipakai, Tipe Penelitian, Teknik Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
	<i>The Application Of Collaborative governance In Local Level Climate And Disaster Resilient Development-AGlobal Review</i> Tahun: 2024	ketahanan terhadap iklim dan bencana di tingkat lokal.	Ansell dan Gash Tipe Penelitian: Deskriptif, kualitatif	terhadap perubahan iklim dan bencana di tingkat lokal. 2. Keberhasilan bergantung pada faktor seperti keterlibatan pemangku kepentingan, alokasi sumber daya yang memadai, dan penggunaan mekanisme yang fleksibel untuk beradaptasi terhadap dinamika lingkungan lokal dan global.	
5.	Peneliti: Jingru Zhang, Mengyuan Zhu Judul Artikel: <i>Collaborative governance Of Municipal Solid Waste In Urban Of Yangtze River Delta</i> Tahun: 2022	Menganalisis kolaborasi yang terjadi di dalam pengelolaan limbah padat di Delta Sungai Yangtze dengan analisis SWOT.	Teori: <i>Collaborative governance</i> Model: Ansell dan Gash Tipe Penelitian: Deskriptif kualitatif	1. Berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukan perlu merumuskan institusi pemerintahan yang kolaboratif tingkat regional dalam pengelolaan sampah. 2. Sinergi pengelolaan sampah dengan industri harus ditingkatkan dan segera menerapkan kompensasi ekologi formal untuk	Perbedaan terletak pada judul penelitian, tujuan, dan lokus penelitian.

No	Nama Peneliti, Judul Artikel, Tahun Penerbitan	Tujuan Penelitian	Teori/Model yang Dipakai, Tipe Penelitian, Teknik Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
				pembuangan sampah ekstrateritorial.	
6.	Peneliti: Hendrik, Alfitri, Ardyan Saptawan, Nengyanti Judul Artikel: <i>Collaborative governance Model In Waste Management: A Stakeholders Empowerment Strategy Toward Sustainable Development In Rejang Lebong District</i> Tahun: 2024	Menganalisis proses, faktor pendukung, dan penghambat dalam tata kelola kolaboratif pengelolaan sampah di Kabupaten Rejang Lebong	Teori: <i>Collaborative governance</i> Model: Ansell dan Gash Tipe Penelitian: Deskriptif kualitatif	1. Penanganan sampah di Rejang Lebong masih mengandalkan metode tradisional. 2. Kolaborasi antar aktor sudah berjalan tetapi belum sepenuhnya optimal. 3. Aktor swasta dalam pengelolaan sampah tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya. 4. Kurangnya kesadaran masyarakat dan lemahnya penegakan hukum mengenai sampah menjadi faktor penghambat dalam tata kelola kolaboratif.	Perbedaan terletak pada judul penelitian dan lokus penelitian.
7.	Peneliti: Grandy L Wungso,	Menganalisis bagaimana proses tata kelola	Teori: <i>Collaborative governance</i>	1. <i>Collaborative governance</i> dalam pengelolaan sampah plastik di Bali sudah berjalan	Perbedaan terletak pada judul penelitian, masalah,

No	Nama Peneliti, Judul Artikel, Tahun Penerbitan	Tujuan Penelitian	Teori/Model yang Dipakai, Tipe Penelitian, Teknik Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
	Santy P Dewi. Aulia H Riswanda Judul: <i>Collaborative governance In Managing Plastic Waste In Bali</i> Tahun: 2024	kolaboratif dalam mengelola lingkungan melalui sampah plastik di Bali.	Model: Ansell dan Gash Tipe Penelitian: Deskriptif kualitatif	dengan baik selaras dengan dasar hukumnya tetapi belum sepenuhnya optimal. 2. Belum terbentuknya kesamaan tujuan antar aktor dilihat dari rendahnya komitmen dan partisipasi masyarakat. 3. Kesadaran dan pemahaman masyarakat yang masih perlu ditingkatkan.	tujuan, dan lokus penelitian.
8.	Peneliti: Julleid Florenza Sohilait, Zainal Abidin Rengifurwarin, Josep A Ufi, Hendry Selanno Judul: <i>Collaborative governance Dalam Pengelolaan Sampah Clean Cities Blue</i>	Menganalisis bagaimana gambaran dinamika yang terjadi pada <i>collaborative governance</i> dalam pengelolaan sampah melalui program <i>Clean Cities, Blue</i>	Teori: <i>Collaborative governance</i> Model: Ansell dan Gash Tipe Penelitian: Kualitatif deskriptif	1. Proses kolaborasi yang terjadi pada pengelolaan sampah melalui Program CCBO di Kota Ambon secara umum teraktualisasikan dengan baik tetapi belum sepenuhnya optimal. 2. Terbatasnya anggaran dan kurangnya partisipasi dari aktor masyarakat menjadi faktor penghambat dalam proses kolaborasi yang terjadi.	Perbedaan terletak pada judul penelitian, masalah, tujuan, dan lokus penelitian.

No	Nama Peneliti, Judul Artikel, Tahun Penerbitan	Tujuan Penelitian	Teori/Model yang Dipakai, Tipe Penelitian, Teknik Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
	<i>Ocean</i> (CCBO) Kota Ambon Tahun: 2024	<i>Ocean</i> (CCBO) di Kota Ambon.			
9.	Peneliti: Idris, Dian Herdiana, Iqbal Miftakhul Mujtahid Judul: <i>Collaborative governance</i> dalam Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna Tahun: 2022	Menganalisis <i>collaborative governance</i> yang terjadi pada pengelolaan sampah di Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna	Teori: <i>Collaborative governance</i> Model: Ansell dan Gash Tipe Penelitian: Kualitatif deskriptif	1. Proses <i>collaborative governance</i> yang terjadi pada pengelolaan sampah di Kecamatan Pulau Tiga berjalan cukup baik tetapi belum sepenuhnya optimal. 2. Terdapat faktor penghambat dalam proses kolaboratif, yaitu minimnya alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah di Kecamatan Pulau Tiga barat.	Perbedaan terletak pada judul penelitian, masalah, tujuan, dan lokus penelitian.
10	Peneliti: Jeanne Steza Ryana Sianturi, Kus Indarto Judul:	Menganalisis <i>collaborative governance</i>	Teori: <i>Collaborative governance</i>	1. Proses kolaborasi yang terjadi pada pengelolaan sampah melalui program “Salin Swara” di Kota	Perbedaan terletak pada judul penelitian, masalah,

No	Nama Peneliti, Judul Artikel, Tahun Penerbitan	Tujuan Penelitian	Teori/Model yang Dipakai, Tipe Penelitian, Teknik Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
	<i>Collaborative governance</i> Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Program Salin Swara Di Kota Bontang Tahun: 2024	yang terjadi pada pengelolaan sampah di Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna	Model: Ansell dan Gash Tipe Penelitian: Kualitatif deskriptif	Bontang belum berjalan secara optimal. 2. Adanya kekurangan, seperti desain institusional belum dikembangkan, kurangnya intensitas dalam dialog tatap muka. rendahnya tingkat komitmen antar <i>stakeholders</i> , dan belum terbentuknya pemahaman Bersama antar <i>stakeholders</i> dalam mencapai tujuan.	tujuan, dan lokus penelitian.
11.	Peneliti: Sabilla Mega Yustika, Diana Hertati Judul: Model <i>Collaborative governance</i> Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis <i>Co-Firing</i> Di Kabupaten Sidoarjo Tahun: 2024	Mendesripsikan model <i>collaborative governance</i> pengelolaan sampah berbasis <i>co-firing</i> RDF Di Kabupaten Sidoarjo.	Teori: <i>Collaborative governance</i> Model: Ansell dan Gash Tipe Penelitian: Kualitatif deskriptif	1. Proses kolaborasi dalam pengelolaan sampah berbasis <i>co-firing</i> RDF Di Kabupaten Sidoarjo sudah berjalan tetapi hasilnya belum maksimal. 2. Pengelolaan sampah berbasis <i>co-firing</i> RDF belum memenuhi target yang telah ditetapkan.	Perbedaan terletak pada judul penelitian, masalah, tujuan, dan lokus penelitian.

No	Nama Peneliti, Judul Artikel, Tahun Penerbitan	Tujuan Penelitian	Teori/Model yang Dipakai, Tipe Penelitian, Teknik Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
12.	Peneliti: Pranawa Adi Nurnathagotra, Raden Slamet Santoso, Hadi Warsono Judul: Kolaborasi Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Di Kabupaten Lamongan Tahun: 2023	Menganalisis proses, faktor pendukung, dan penghambat dari <i>collaborative governance</i> pengelolaan RTH di Kabupaten Lamongan	Teori: <i>Collaborative governance</i> , Teori pendukung dan penghambat Model: Ansell & Gash, Emerson & Nabatchi Tipe Penelitian: Kualitatif deskriptif	1. Proses kolaborasi pengelolaan RTH di Kabupaten Lamongan berjalan positif tetapi masih belum optimal. 2. Adanya <i>feedback</i> masyarakat, landasan hukum, peranan <i>stakeholders</i> , transparansi informasi menjadi faktor pendukung dalam proses kolaborasi yang terjadi dalam pengelolaan RTH di Kabupaten Lamongan. 3. Hambatan yang terjadi karena masih mengandalkan komunikasi online, minimnya sumber daya anggaran, fasilitas, dan SDM.	Perbedaan terletak pada judul penelitian dan lokus penelitian.
13.	Peneliti: Hana Imtiyaza, Retno Sunu Astuti, Kismartini	Menganalisis proses dan faktor pendukung serta penghambat dari	Teori: Teori <i>collaborative governance</i> , Teori	1. Kolaborasi yang dilakukan dalam pengembangan Desa Wisata Kaliwilingi sudah menerapkan proses dialog tatap muka, membangun	Perbedaan terletak pada judul penelitian dan lokus penelitian.

No	Nama Peneliti, Judul Artikel, Tahun Penerbitan	Tujuan Penelitian	Teori/Model yang Dipakai, Tipe Penelitian, Teknik Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
	Judul: <i>Collaborative governance</i> Dalam Pengembangan Desa Wisata Kaliwangi Di Kabupaten Brebes Tahun: 2024	<i>collaborative governance</i> pengembangan Desa Wisata Kaliwangi di Kabupaten Brebes	pendukung dan penghambat Model: Ansell dan Gash, Mattessich dan Monsey Tipe Penelitian: Kualitatif deskriptif	kepercayaan, komitmen terhadap proses, dan pemahaman bersama. 2. Terdapat faktor penghambat dalam keberjalanan kolaborasi, yaitu keanggotaan, struktur, komunikasi, dan sumber daya.	
14.	Peneliti: Khaerul Umam Noer, Sipin Putra Judul: <i>Collaborative governance In Natural Disaster Mitigation in Bekasi Regency, Indonesia</i> Tahun 2022	Menganalisis tata kelola kolaboratif dalam mitigasi bencana alam di Kabupaten Bekasi.	Teori: <i>Collaborative governance</i> Model: Ansell & Gash Tipe Penelitian: Kualitatif deskriptif	1. Dalam proses kolaboratif, forum tidak rutin dilakukan dan hanya menjadi kebutuhan mendesak saja. 2. Kepemimpinan fasilitatif, baik dari pemerintah, swasta, dan masyarakat sebagai mediator belum adanya	Perbedaan terletak pada judul penelitian, masalah, tujuan, dan lokus penelitian.
15.	Peneliti: Muhammad Noor	Menganalisis dan mengidentifikasi	Teori:	1. Adanya kesenjangan antar kepentingan sehingga terjadi	Perbedaan terletak pada judul

No	Nama Peneliti, Judul Artikel, Tahun Penerbitan	Tujuan Penelitian	Teori/Model yang Dipakai, Tipe Penelitian, Teknik Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
	Judul: <i>Strengths And Interest Between Actors In Collaborative governance: Review Of The Riverside Settlement Revitalization Policy In Banjarmasin City</i> Tahun: 2023	kekuatan dan kepentingan antar aktor yang terlibat dalam revitalisasi rumah di kawasan tepian sungai Kota Banjarmasin dalam konsep <i>collaborative governance</i> .	Model: Ansell & Gash Tipe Penelitian: Deskriptif kualitatif	signifikansi di antara para aktor dan pihak yang lemah tidak berpartisipasi. 2. Deliberasi tidak dilakukan secara kolektif. Keterbatasan anggaran yang mengharuskan menggandeng peran swasta.	penelitian, masalah, tujuan, dan lokus penelitian.

Berdasarkan kajian riset terdahulu terhadap sejumlah literatur, terdapat sejumlah perbedaan fokus, lokus, dan gejala penelitian yang digunakan oleh masing-masing peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) berbasis teknologi RDF sebagai lokus penelitian. Pemilihan lokus ini didasari pada peran strategis TPST RDF Kabupaten Cilacap sebagai *pilot project* pertama di Indonesia yang menerapkan konsep *waste to energy* dalam pengelolaan sampah berkelanjutan.

Berdasarkan pada riset terdahulu, ditetapkan *research gap* yang diambil peneliti. Penelitian ini akan lebih spesifik membahas secara mendalam permasalahan pada proses *collaborative governance* pengelolaan sampah terpadu berbasis teknologi RDF di Kabupaten Cilacap yang memfokuskan pada proses kolaborasi *multi-stakeholder*. Pendekatan analisis dalam penelitian ini menggunakan teori Ansell dan Gash (2008) untuk memahami proses kolaborasi yang terjadi. Dimensi analisis meliputi dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen dalam proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam *collaborative governance* dari *Government of Canada (2008)* yang meliputi faktor budaya, institusi, dan politik. Penelitian ini memberikan fokus unik dan mendalam pada pengelolaan sampah terpadu berbasis teknologi RDF di Kabupaten Cilacap yang mencakup proses kolaborasi, tantangan teknis, koordinasi lintas sektor, dan partisipasi *multi-stakeholder* dalam mendukung model pengelolaan sampah berkelanjutan dalam rangka *waste to energy*.

1.5.1. Administrasi Publik

Administrasi berasal dari bahasa latin, yaitu gabungan dari dua kata “*ad*” dan “*ministrate*” yang berarti “*to serve*”. Dalam bahasa Indonesia istilah ini diartikan sebagai memenuhi atau memberikan pelayanan (Anggara, 2016). Dalam masa kekaisaran romawi, kata administrasi dihubungkan dengan tugas-tugas yang berfokus dalam pemberian layanan (Tjiptoherijanto & Manurung, 2017). Definisi pertama tentang administrasi publik dikemukakan oleh Woodrow Wilson dalam Tjiptoherijanto & Manurung (2017) yang menjelaskan administrasi publik adalah “*...as the detailed and systems of public law*”.

Tsisinska & Podolchak (2023) dalam artikel yang berjudul *mechanisms and principles of interaction between public administration entities in cross-border cooperation* mendefinisikan administrasi publik sebagai seperangkat prinsip, metode, bentuk, dan sarana dampak pada aktivitas suatu wilayah dan negara secara keseluruhan. Dalam konteks kolaborasi atau kerjasama, ini melibatkan interaksi antara entitas administrasi publik, khususnya dalam kerjasama lintas batas, di mana entitas ini bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama melalui mekanisme terstruktur, kerangka hukum, dan berbagai bentuk kerjasama, sehingga meningkatkan pembangunan daerah dan mengatasi tantangan bersama

Chandler dan Plano dalam Keban (2004) mendefinisikan administrasi publik sebagai suatu proses yang melibatkan pengorganisasian dan koordinasi sumber daya guna merumuskan, melaksanakan, serta mengelola keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik. The Liang Gie (1993) mendefinisikan administrasi publik lebih spesifik yaitu sebagai serangkaian tindakan penyelenggaraan yang dilakukan

dalam kerangka kerjasama sekelompok manusia dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Menurut Shafritz & Russel dalam Keban (2004) menjelaskan sangat rumit untuk menemukan satu definisi komprehensif yang menggambarkan administrasi publik secara jelas. Shafritz & Russell (1997) mengemukakan bahwa administrasi publik dapat didefinisikan dalam empat kategori, yaitu: (1) *Politik*, memahami administrasi publik sebagai "*what government does*" baik langsung maupun tidak langsung sebagai suatu tahapan siklus kebijakan publik; (2) *Legal/hukum*, memahami administrasi publik sebagai "*law in action*" atau pelaksanaan hukum serta aturan di masyarakat; (3) *Manajerial*, memahami administrasi publik sebagai fungsi eksekutif dalam pemerintahan dan sebagai bentuk spesialisasi dalam manajemen; (4) *Mata pencaharian*, memahami administrasi publik sebagai profesi yang menyediakan *service to public*.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah serangkaian kerjasama yang dilakukan secara terorganisir. Menerapkan prinsip efektifitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan publik dalam manajemen sumber daya serta mengelola kebijakan publik untuk mencapai kepentingan masyarakat. Perkembangan administrasi publik mengalami kemajuan yang sangat pesat. Paradigma-paradigma ini tidak hanya mencerminkan pergeseran perspektif dalam pengelolaan sektor publik tetapi juga memberikan landasan teoritis untuk menjawab permasalahan kompleks di masyarakat. Pembahasan lebih lanjut mengenai paradigma administrasi publik menjadi penting untuk memahami arah dan relevansi dari setiap pendekatan yang diterapkan.

1.5.2. Paradigma Administrasi Publik

Paradigma merupakan konsep inti yang berfungsi sebagai kerangka acuan mendasar bagi berbagai teori dan praktik ilmiah selama periode tertentu (Almas, 2018). Peneliti memahami paradigma sebagai cara pandang peneliti dalam memahami dan menyelesaikan suatu permasalahan. Perkembangan paradigma administrasi publik mencerminkan adanya transformasi dalam hal tujuan, teori, pendekatan, metode, serta nilai-nilai yang menjadi dasar operasionalnya. Paradigma diperlukan untuk memperbaiki dan melengkapi ilmu yang sudah ada sehingga memunculkan konsep ilmu baru. Nicholas Henry dalam Astuti et al., (2020) mengungkapkan bahwa terdapat enam paradigma administrasi publik, sebagai berikut:

1. **Paradigma I: Dikotomi Politik (1900-1926).** Tokoh yang memainkan peran penting dalam masa ini yaitu Frank J Goodnow dan Leonarde D. White dalam buku *Politic and Administration*. Mereka mengidentifikasi dua fungsi utama yang dijalankan oleh pemerintah, yaitu fungsi administrasi lebih berfokus pada implementasi kebijakan yang telah diterapkan. Paradigma ini mengatakan bahwa administrasi seharusnya dilihat sebagai entitas yang bebas nilai dan bertujuan untuk mencapai efisiensi dan nilai ekonomi dalam *government bureaucracy*. Paradigma ini hanya berfokus pada aspek lokus, yaitu *government bureaucracy* tanpa memberikan penjelasan secara rinci dan menyeluruh mengenai metode yang perlu dikembangkan dalam administrasi publik.

2. **Paradigma II: Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937).** Paradigma ini dipengaruhi oleh pemikiran Gullick & Urwick dan W.F. Willoughby yang terinspirasi oleh tokoh-tokoh manajemen klasik. Mereka mengadopsi dan menerapkan prinsip-prinsip administrasi yang dikenal istilah *Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting* (POSDCORB). Prinsip tersebut dapat diterapkan secara universal sehingga lokus administrasi publik menjadi tidak jelas. Paradigma ini lebih menekankan pada fokusnya dibandingkan lokusnya (Sedarmayanti, 2013)
3. **Paradigma III: Administrasi Negara Sebagai Ilmu Politik (1950-1970).** Paradigma ini lahir sebagai tanggapan terhadap kritik Herbert Simon terhadap paradigma sebelumnya yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip administrasi tidak dapat diterapkan secara universal. Hal ini disebabkan karena administrasi negara tidak bersifat *value free* dan dipengaruhi oleh berbagai nilai tertentu. John Gaus dengan tegas menyatakan bahwa teori administrasi publik merupakan teori politik, mengingat adanya asumsi tentang *value-free administration* dan *value laden politics* yang saling berlaku. Paradigma ini melihat administrasi publik sebagai bagian integral dari ilmu politik yang terkait erat hubungannya dengan birokrasi pemerintahan. Kelemahan yang terdapat dalam prinsip-prinsip administrasi publik menyebabkan fokus dalam administrasi publik menjadi kabur. Pada paradigma ini administrasi

publik menghadapi krisis identitas karena ilmu politik dianggap lebih dominan sebagai disiplin dunia administrasi publik.

4. Paradigma IV: Administrasi Publik Sebagai Ilmu Administrasi

(1956-1970). Paradigma ini merupakan suatu kritik yang mendalam terhadap paradigma sebelumnya yang menyatakan bahwa administrasi publik tidak dianggap sebagai disiplin kelas dua setelah ilmu politik. Oleh karena itu, solusi alternatif dan pilihan yang diambil adalah kembali pada induknya, yaitu ilmu administrasi. Fase ini prinsip-prinsip manajemen yang sebelumnya populer dikaji dan dikembangkan secara lebih ilmiah dan mendalam. Fokus utama dalam paradigma ini mencakup perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern seperti metode kuantitatif, analisis sistem, dan riset operasi. Fokus paradigma ini berorientasi pada pengembangan ilmu administrasi murni yang diperkuat oleh disiplin ilmu, seperti psikologis, sosiologi, serta kebijakan publik. Semua fokus yang dikembangkan dianggap dapat diterapkan tidak hanya dalam sektor bisnis tetapi juga dalam administrasi publik sehingga menyebabkan lokusnya menjadi tidak jelas.

5. Paradigma V: Administrasi Publik Sebagai Administrasi Publik

(1970-sekarang). Pada paradigma ini ilmu administrasi publik telah berkembang menjadi disiplin ilmu yang mandiri. Dalam perkembangannya, administrasi publik berfungsi sebagai wadah bagi berbagai disiplin ilmu lain yang berada di bawahnya. Salah satu ilmu yang menjadi bagian integral dari ilmu administrasi publik adalah

manajemen publik. Seperti yang dikemukakan oleh Nicholas Henry, fase ini menekankan pada teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik sebagai fokus utamanya. Paradigma ini telah berhasil menetapkan fokus dan lokus yang jelas. Fokus administrasi publik terletak pada pengembangan teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik. Lokusnya mencakup pada berbagai isu serta kepentingan publik yang menjadi perhatian utama.

6. **Paradigma VI: *Governance* (1990-sekarang).** Paradigma ini menjelaskan adanya proses pemerintah yang modern. Dalam pembuatan kebijakan publik, yang dilakukan tidak hanya oleh pemangku kepentingan saja atau pemilik kekuasaan, akan tetapi juga melibatkan warga negara, dan kelompok dari masyarakat, serta sektor privat. Terdapat hubungan antara pemegang kekuasaan dengan sektor lainnya untuk bisa ikut serta dalam proses menyediakan layanan publik. Pemerintah saat ini sebagai pengatur dan pengarah dalam urusan penyelenggaraan negara. Prinsip dasar dari paradigma ini meliputi kolaborasi, pengurangan peran dominasi, serta pelimpahan tanggung jawab kepada aktor lain sesuai kebutuhan.

Berdasarkan penjelasan diatas, Penelitian ini berlandaskan pada paradigma 6 yaitu *governance* karena menitikberatkan pada proses kerjasama dan kolaborasi lintas sektor, mengembangkan serta memberikan pelayanan terkait pengelolaan sampah terpadu berbasis teknologi RDF di Kabupaten Cilacap. Pendekatan ini menciptakan proses, dinamika, dan interaksi kolaborasi yang sinergis.

Administrasi publik tidak dapat terlepas dari pengaruh dan perkembangan lingkungan, terutama pada kemajuan teknologi dan informasi. Administrasi publik mengharuskan melakukan penyesuaian dan adaptasi terhadap paradigma yang ada untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Salah satu elemen kunci yang menjadi bagian tak terpisahkan dari administrasi publik adalah konsep manajemen publik. Manajemen publik sebagai bagian penting dari administrasi publik yang berperan dalam memastikan pengelolaan sumber daya, kebijakan, dan pelayanan publik agar berjalan efektif dan efisien. Berdasarkan hal tersebut, pembahasan lebih lanjut mengenai manajemen publik dalam mendukung fungsi administrasi publik yang adaptif dan berorientasi pada masyarakat.

1.5.3. Manajemen Publik

Shafritz dan Russel dalam (Keban, 2008) mendefinisikan manajemen publik merupakan upaya menjalankan organisasi secara bertanggung jawab dengan memanfaatkan sumber daya, baik manusia maupun alat untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Pendefinisian lainnya dijelaskan George Terry dalam Syafiie (2010) yaitu manajemen publik merupakan suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Tujuan dari proses ini adalah untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya secara optimal.

Overman dalam Keban (2008) menjelaskan manajemen publik bukanlah bentuk dari “*scientific management*” meskipun konsep tersebut memberikan pengaruh dari konsep tersebut. Manajemen publik juga bukan “*policy analysis*” atau administrasi publik, melainkan merepresentasikan interaksi antara orientasi

politik dan kebijakan. Sebagai studi interdisipliner, manajemen publik menggabungkan fungsi manajemen, seperti *planning*, *organizing*, dan *controlling* termasuk sumber daya, keuangan, fisik, informasi, dan politik. Berdasarkan pandangan Overman, OTT, Hyde, dan Shafritz dalam Pasolong (2008), manajemen publik dan kebijakan adalah dua bidang dalam administrasi publik yang saling berhubungan dan sering kali memiliki tumpang tindih dalam praktiknya. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada perannya, yaitu kebijakan publik diibaratkan sebagai sistem otak dan saraf yang bertugas merancang arah serta mengambil keputusan, sementara manajemen publik berfungsi sebagai sistem jantung dan sirkulasi yang menggerakkan sumber daya untuk melaksanakan arahan dari kebijakan publik.

Berdasarkan pemahaman di atas, manajemen publik berperan penting dalam pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan publik yang efektif dan efisien guna mencapai kepentingan publik. Namun, kompleksitas masyarakat modern menuntut pendekatan yang lebih kolaboratif. Adanya kolaborasi antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat yang menjadikannya relevan untuk mendukung pemahaman manajemen publik dalam menghadapi tantangan di era modern.

1.5.4. Collaborative Governance

1.5.4.1. Definisi Collaborative Governance

Collaborative governance muncul sebagai pendekatan mendasar dalam menghadapi tantangan sosial yang semakin kompleks dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip kerjasama ke dalam praktik manajemen

publik. Kolaborasi dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara efektif oleh satu institusi saja, sehingga diperlukan keterlibatan berbagai pihak untuk mencapai solusi yang lebih komprehensif. Dalam pendekatan ini, pemerintah melibatkan sektor swasta dan masyarakat untuk bersama-sama mengelola urusan publik dengan menekankan inklusivitas dan pengambilan keputusan secara kolektif. Model *collaborative governance* membutuhkan partisipasi aktif dari aktor *stakeholders* melalui dialog untuk mengungkapkan dan menyelaraskan kepentingan masing-masing (Astuti et al., 2020).

O'Flynn dan Wanna (2008) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai pemangku kepentingan yang saling bergantung dan berasal dari berbagai aktor untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan secara bersama-sama. Pendekatan ini diterapkan untuk mengatasi berbagai masalah dan situasi yang kompleks. Booher dan Innes dalam Astuti et al., (2020) menjelaskan kolaborasi dipandang sebagai suatu proses yang menitikberatkan pada pengelolaan jaringan sosial dimana berbagai pemangku kepentingan saling terhubung dalam sebuah hubungan yang membentuk simpul-simpul kerjasama.

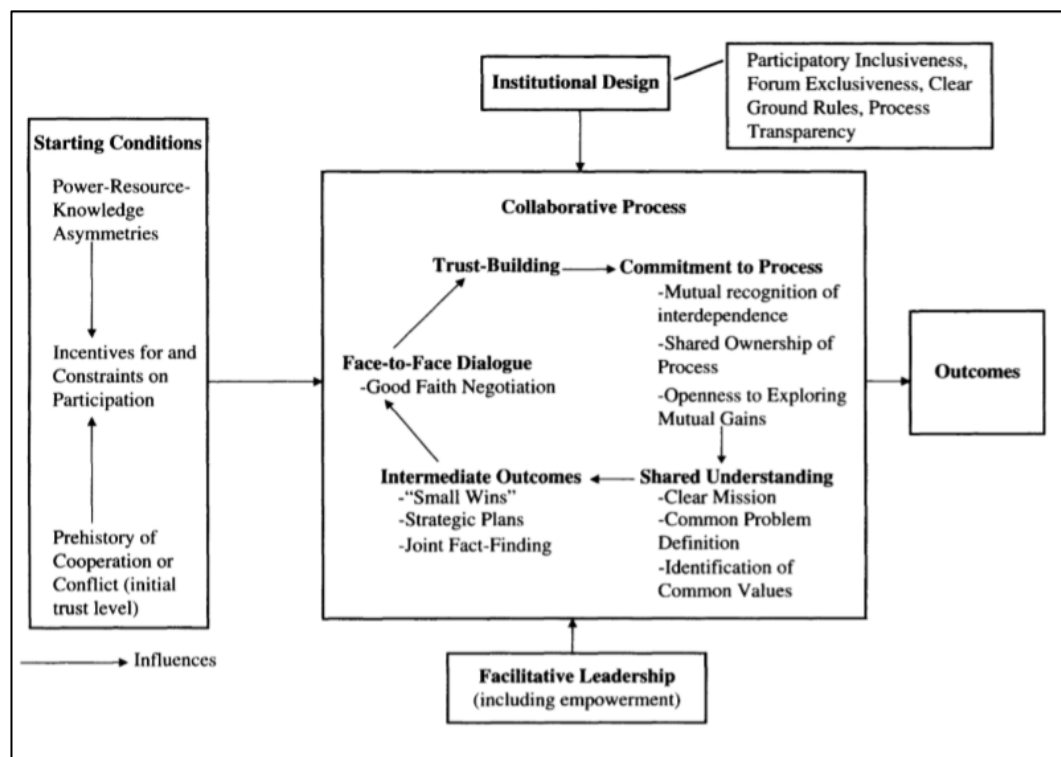
Robert & Tayson dalam Subarsono (2016) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai kegiatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan substansial untuk bersama-sama mengambil keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap aktor memiliki kesempatan yang setara dalam menyampaikan

pendapatnya untuk merumuskan keputusan bersama. Ansell dan Gash (2008) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai suatu mekanisme di mana lembaga publik secara aktif melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam perumusan hingga implementasi kebijakan publik. Proses ini menekankan pengambilan keputusan formal yang berorientasi pada konsensus serta mengedepankan prinsip musyawarah dalam prosedur organisasi publik.

Ansell dan Gash (2008) memaparkan bahwa *collaborative governance* terdiri dari empat variabel utama, yaitu: (1) Kondisi awal; (2) Kepemimpinan yang fasilitatif; (3) Desain institusional; dan (4) Proses kolaborasi. Bersumber pada teori-teori yang telah dikemukakan oleh para pakar diatas, peneliti tertarik untuk meneliti proses kolaborasi yang terjalin pada pengelolaan sampah terpadu berbasis teknologi RDF di Kabupaten Cilacap atas dasar teori proses *collaborative governance* dari Ansell dan Gash dengan komponennya.

Dalam konteks ini, kolaborasi antara pemangku kepentingan menjadi hal yang krusial untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Burgess (2014) menjelaskan kolaborasi memungkinkan untuk menarik keterlibatan lebih banyak pihak dalam perumusan solusi atas permasalahan publik sehingga menghasilkan kebijakan publik secara bersama melalui proses musyawarah dengan menggabungkan berbagai perspektif sosial.

Apabila dibandingkan dengan teori lain, teori *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash memiliki keunggulan salah satunya dari segi fleksibilitas dan aplikabilitas dalam berbagai konteks. Teori ini tidak hanya berfokus pada struktur formal atau prosedural tetapi juga memperhatikan dinamika interaksi antar aktor yang berbeda sehingga adanya penyesuaian terhadap berbagai situasi dan kebutuhan. Dengan menggunakan teori ini, penelitian dapat lebih mengeksplorasi peran dan kontribusi masing-masing pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan dan tantangan utama dalam pengelolaan sampah berkelanjutan. Model kolaborasi yang diajukan oleh Ansell dan Gash secara rinci menggambarkan proses kolaborasi yang berlangsung dalam siklus seperti yang disajikan dalam Gambar 1.5.



Gambar 1.5. Model Collaborative Governance Ansell dan Gash

Sumber: Ansell dan Gash (2008) dalam Astuti et al., (2020)

Berdasarkan Gambar 1.5 diatas, disajikan model tata kelola kolaboratif yang dikemukakan Ansell and Gash, sebagai berikut:

1. Kondisi awal (*Starting Conditions*). Ansell dan Gash (2008) merupakan salah satu variabel penting yang berpengaruh untuk mencapai keberhasilan proses kolaborasi. Kondisi awal merujuk pada situasi dan konteks yang ada sebelum proses kolaborasi dimulai yang meliputi beberapa faktor kunci. Ansell dan Gash (2008) menekankan bahwa kondisi awal ini sangat penting untuk dipertimbangkan karena akan mempengaruhi motivasi, sikap, dan perilaku para pemangku kepentingan dalam terlibat dalam proses kolaborasi. Berdasarkan hal tersebut, upaya untuk membangun kepercayaan, mengelola konflik, dan memobilisasi sumber daya yang diperlukan seringkali menjadi langkah awal yang penting sebelum proses kolaborasi dapat dimulai dengan efektif;
2. Kepemimpinan Fasilitatif (*Facilitate Leadership*). Ansell dan Gash (2008) mengemukakan bahwa komponen ini memainkan peran penting dalam memandu dan mengarahkan *stakeholders* forum diskusi serta membangun keterlibatan mereka dalam proses membangun konsensus secara kolaboratif;
3. Desain Kelembagaan (*Institutional Design*), diperlukan sebagai bentuk usaha dalam meningkatkan partisipasi dan transparansi dalam proses kolaborasi. Desain institusional menegaskan aturan main kolaborasi termasuk aturan siapa yang disertakan, aturan

pembentukan forum, bentuk dari aturan kolaborasi yang jelas dan transparansi dalam aturan kolaborasi Ansell dan Gash (2008);

4. Proses Kolaboratif (*Collaborative Process*), menjadi komponen yang paling penting dan terdiri dari lima proses, yakni dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara.

1.5.4.2. Proses *Collaborative Governance*

Sudarmo (2011) menjelaskan kolaborasi dapat dipahami dalam dua makna: (1) Kolaborasi dalam arti proses merupakan cara mengatur, mengelola, atau memerintah dalam suatu sistem yang melibatkan berbagai institusi, baik pemerintah maupun non-pemerintah, sesuai dengan peran dan kepentingan masing-masing; dan (2) Kolaborasi dalam arti normatif merupakan tujuan atau nilai yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam membangun hubungan yang efektif dengan mitra-mitranya. *Collaborative governance* bisa merupakan bukan institusi formal tetapi juga bisa merupakan *a way of behaving* (cara berperilaku/bersikap) institusi non-pemerintah yang lebih besar dalam melibatkan ke dalam manajemen publik pada suatu periode.

Dalam hal ini, peneliti lebih menekankan pada sejauh mana kolaborasi antara para pemangku kepentingan berjalan dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam proses pengelolaan sampah terpadu berbasis teknologi RDF di Kabupaten Cilacap.

1. Dialog Tatap Muka (*Face to Face Dialogue*). Setiap bentuk kolaborasi dimulai dengan proses dialog tatap muka yang berfokus pada upaya

mencapai kesepakatan bersama atau konsensus (Ansell dan Gash, 2008). Dialog tatap muka tidak hanya sebagai media dalam melakukan negosiasi di antara pemangku kepentingan tetapi juga menjadi bagian yang mengawali dari proses membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses kolaborasi, dan berbagai pemahaman untuk mencapai hasil kolaborasi. De Roo (2007) menjelaskan dialog yang berlangsung harus berbentuk komunikasi berorientasi konsensus. Dibutuhkan aktor yang mendukung, yaitu mereka yang memiliki keterampilan komunikasi, pemahaman terhadap substansi, serta berorientasi pada pencapaian tujuan demi kepentingan bersama;

2. Membangun Kepercayaan (*Trust Building*). Menurut Ansell dan Gash (2008) menekankan pentingnya membangun kepercayaan sebagai salah satu faktor kunci keberhasilan *collaborative governance*. Kepercayaan dipandang sebagai elemen penting dalam proses kolaboratif karena dapat memfasilitasi kerjasama, berbagi informasi, dan pencapaian kesepakatan di antara para pemangku kepentingan yang terlibat. Kepercayaan tidak hanya penting pada tahap awal *collaborative governance* tetapi juga perlu dipelihara dan dikembangkan secara terus-menerus selama proses kolaborasi berlangsung. Hal ini dapat mendorong komitmen dan partisipasi yang lebih efektif dari semua pihak untuk mencapai tujuan bersama;
3. Komitmen Terhadap Proses (*Commitment to Process*). Ansell dan Gash (2008) menekankan bahwa tanpa adanya komitmen yang dipegang dari pemangku kepentingan maka proses kolaborasi tidak akan berjalan

maksimal bahkan akan mengalami kegagalan. Komitmen ini penting untuk memastikan bahwa masing-masing pihak bersedia untuk menginvestasikan waktu, sumber daya, dan upaya yang diperlukan dalam proses kolaborasi yang seringkali panjang dan kompleks;

4. Pemahaman Bersama (*Share Understanding*). Ansell dan Gash (2008) mengemukakan bahwa proses kolaboratif, setiap pemangku kepentingan yang terlibat harus bersedia untuk berbagi pemahaman yang dimilikinya terkait hal yang dapat dicapai oleh para pemangku kepentingan melalui pelaksanaan kolaborasi termasuk berbagi tujuan bersama, tujuan jelas, arah dan strategi yang jelas. Dalam pelaksanaan *collaborative governance* juga penting bagi semua pihak untuk memiliki pemahaman bersama terhadap isu dan permasalahan yang dihadapi bersama-sama sebagai upaya untuk menghasilkan penyelesaian masalah. Dengan saling berbagi pemahaman berimplikasi pada consensus atas persetujuan dalam menafsirkan dan menguraikan suatu permasalahan;
5. Hasil Sementara (*Intermediate Outcomes*). Kolaborasi berperan penting dalam menjaga keberlanjutan kerjasama. Ketika manfaat dari kolaborasi mulai terasa, meskipun masih dalam skala kecil (*small wins*), hal ini dapat menjadi dorongan positif bagi para pemangku kepentingan untuk terus berkomitmen dan membangun kepercayaan satu sama lain (Ansell dan Gash, 2008).

1.5.5. Faktor Penghambat *Collaborative Governance*

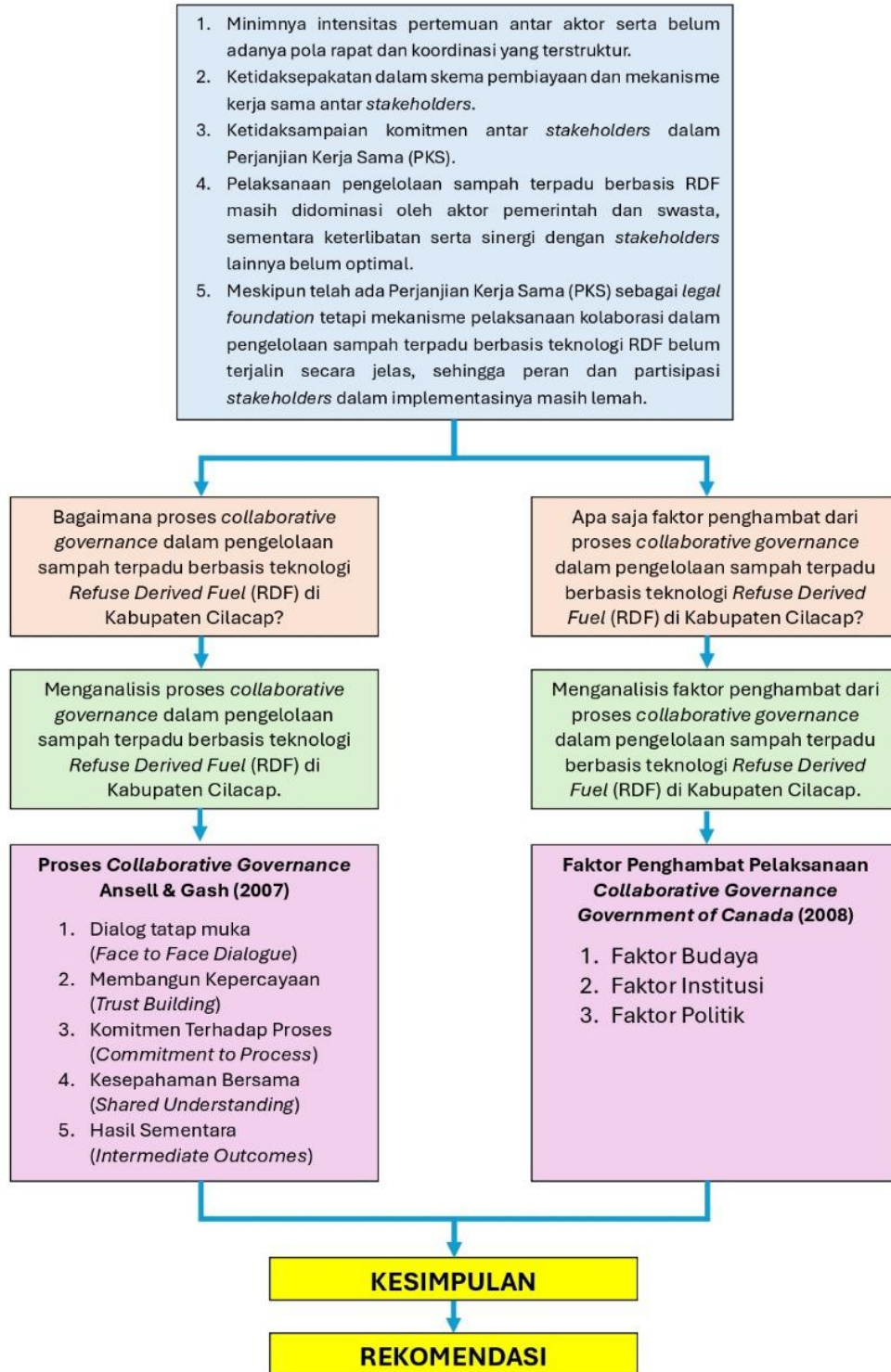
Penelitian mengenai tata kelola kolaboratif berkaitan erat dengan konsep kolaborasi yang mencerminkan bentuk kerjasama antar berbagai pihak. *Collaborative governance* terdapat kriteria yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai keberhasilan atau kegagalan implementasinya. Kriteria ini penting untuk dipahami agar dapat mengevaluasi secara objektif apakah implementasi *collaborative governance* berhasil mencapai tujuan kolaborasi atau menghadapi kendala yang menyebabkan kegagalan selama prosesnya.

Government of Canada (2008) memaparkan mengenai yang menjadi penghambat suatu kolaborasi yaitu disebabkan beberapa faktor antara lain: (1) faktor budaya; (2) faktor institusi; dan (3) faktor politik. Ketiga faktor-faktor tersebut dijelaskan sebagai berikut ini:

1. Faktor Budaya. *Collaborative governance* dapat gagal akibat budaya birokrasi yang terlalu bergantung pada prosedur, kurangnya keberanian mengambil risiko, dan dominasi pendekatan *top-down* oleh pemerintah. Hambatan lainnya mencakup dominasi pemerintah dalam pengambilan keputusan, minimnya partisipasi pemangku kepentingan, serta kooptasi dengan memihak kelompok pro-kebijakan pemerintah sambil mengabaikan oposisi. Efektivitas kolaborasi hanya dapat tercapai jika semua pihak memiliki mentalitas kerjasama yang egaliter, pragmatis, dan berorientasi pada hasil, serta bersedia menyesuaikan pendekatan untuk meningkatkan partisipasi dan keberhasilan bersama.

2. Faktor Institusi. Kolaborasi dapat terhambat oleh kecenderungan institusi, terutama pemerintah, yang mengutamakan struktur hierarkis dalam kerjasama. Pendekatan vertikal ini bertentangan dengan prinsip kolaborasi yang membutuhkan pengorganisasian horizontal antara pemerintah dan pihak non-pemerintah. Sistem demokrasi representatif seringkali kurang cocok karena menuntut formalisme tinggi yang menyulitkan spontanitas. Selain itu, akuntabilitas institusi publik yang kaku, hanya berfokus pada aturan internal dan atasan, membatasi fleksibilitas yang diperlukan untuk membangun kemitraan setara dalam kolaborasi. Hal ini menghambat terciptanya sinergi yang responsif.
3. Faktor Politik. Kegagalan kolaborasi sering kali dipicu oleh kurangnya inovasi kepemimpinan dalam menghadapi dinamika politik yang kompleks dan sering bertentangan. Pemimpin yang visioner memiliki peran penting dalam memperkenalkan nilai serta tujuan baru yang dapat memperkuat kerjasama. Selain itu, perubahan kesepakatan awal dan perbedaan kepentingan antar pemangku kepentingan juga menjadi tantangan utama. Konflik yang muncul dapat diminimalkan melalui pendekatan kolaboratif yang efektif. Namun, tanpa kepemimpinan yang inovatif dan adaptif, upaya kolaborasi berisiko terhambat, terutama ketika kepentingan politik dari masing-masing pihak sulit untuk diselaraskan.

1.6. Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 1.6. Kerangka Pikir Penelitian

Sumber: Formulasi Peneliti, (2025)

1.7. Operasionalisasi Konsep

1.7.1. Proses *Collaborative governance*

Proses *collaborative governance* adalah suatu mekanisme pengelolaan kebijakan atau program yang melibatkan kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan baik dari lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam menyelesaikan masalah publik. Dalam proses kolaboratif ini semua lintas sektor terlibat dalam diskusi, negosiasi, saling memahami, dan saling mempercayai untuk mencapai tujuan yang sama dalam pengelolaan sampah terpadu berbasis teknologi RDF di Kabupaten Cilacap. Proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah terpadu berbasis teknologi RDF di Kabupaten Cilacap dapat diamati melalui:

- a. Dialog tatap muka (*Face to face dialouge*) adalah ruang komunikasi antar *stakeholders* untuk diskusi dan negosiasi dalam melahirkan konsensus bersama.
- b. Membangun kepercayaan (*Trust building*) adalah proses dinamis dalam mengembangkan rasa saling percaya sehingga antar *stakeholders* dapat saling terbuka dalam proses kolaborasi dengan memperhatikan waktu yang tepat dan menumbuhkan kepercayaan secara efektif.
- c. Komitmen dalam proses kolaborasi (*Commitment to process*) adalah proses yang mengacu pada rasa saling memiliki agar tetap terlibat serta kesediaan dalam melaksanakan tanggung jawab sehingga proses kolaborasi berjalan sesuai dengan kesepakatan dalam mencapai tujuan bersama.

- d. Pemahaman bersama (*Shared understanding*) adalah pembentukan dan pengembangan pemahaman persepsi bersama akan nilai-nilai kolaborasi dan tujuan yang telah ditetapkan untuk menghindari adanya kesalahpahaman.
- e. Hasil sementara (*Intermediate outcomes*) adalah keluaran/hasil kecil selama proses kolaboratif yang dapat dirasakan secara nyata dan memiliki dampak pada kelanjutan kerjasama, termasuk rencana strategis, fakta, ataupun umpan balik terhadap keluaran tersebut.

Tabel 1.5. Operasionalisasi Konsep Proses *Collaborative Governance*

Fenomena	Sub fenomena	Gejala yang Diamati di Lapangan
Proses <i>Collaborative governance</i> dalam Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Teknologi RDF di Kabupaten Cilacap	Dialog Tatap Muka (<i>Face to Face Dialogue</i>)	a. Adanya partisipasi <i>stakeholders</i> yang terlibat b. Adanya proses negosiasi dalam mengambil keputusan c. Adanya ruang diskusi antar <i>stakeholders</i>
	Membangun Kepercayaan (<i>Trust Building</i>)	a. Keterbukaan informasi antar <i>stakeholders</i> b. Pemenuhan tanggung jawab sesuai dengan tupoksi
	Komitmen Terhadap Proses (<i>Commitment to Process</i>)	a. Kesadaran akan saling ketergantungan antar <i>stakeholders</i> terlibat b. Usaha <i>stakeholders</i> dalam membangun kepercayaan
	Pemahaman Bersama (<i>Shared Understanding</i>)	a. Usaha meningkatkan kesadaran b. Visi dan misi bersama
	Hasil Sementara (<i>Intermediate Outcomes</i>)	a. Kemenangan kecil b. Rencana strategis c. Temuan fakta bersama

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

1.7.2. Faktor Penghambat Proses *Collaborative governance*

Faktor penghambat adalah hal-hal yang bisa menghalangi atau memperlambat mencapai tujuan bersama dalam proses *collaborative governance* pengelolaan sampah terpadu berbasis teknologi RDF di Kabupaten Cilacap. Faktor penghambat dalam proses *collaborative governance* pengelolaan sampah terpadu berbasis teknologi RDF di Kabupaten Cilacap dapat diamati melalui:

- a. Faktor budaya, adalah faktor yang berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam aspek budaya kerja. Faktor ini mencakup pola komunikasi, tingkat partisipasi, serta nilai-nilai yang dianut dalam lingkungan kerja.
- b. Faktor institusi, adalah faktor yang melingkupi hubungan antar para pemangku kepentingan dalam proses kolaborasi. Faktor institusi dapat berkaitan tentang perencanaan, struktur tugas, dan fungsi dari setiap pemangku kepentingan yang terlibat.
- c. Faktor politik, adalah akses kepemimpinan yang harus diperoleh para pemangku kepentingan yang melakukan kolaborasi dengan kepentingan pemerintah dalam pengaturan regulasi kebijakan dapat mempengaruhi keberlangsungan politik kolaborasi.

Tabel 1.6. Operasionalisasi Konsep Faktor Penghambat

Fenomena	Sub fenomena	Gejala yang Diamati di Lapangan
Faktor Penghambat Proses <i>Collaborative governance</i> Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Teknologi RDF Di Kabupaten Cilacap	Faktor Budaya	a. Menghindari risiko (<i>Risk averse</i>)
	Faktor Institusi	a. Rigiditas
	Faktor Politik	a. Kepemimpinan inovatif

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

1.8. Argumen Penelitian

Lahat & Sher-Hadar (2020) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai pendekatan atau strategi dalam sektor publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari berbagai sektor untuk bersama-sama merancang dan mengimplementasikan suatu kebijakan atau program. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan sampah sangat penting dikaji karena sifatnya yang multidimensional dimana melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Penanganan sampah tidak hanya memerlukan intervensi teknis, tetapi juga koordinasi antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda, seperti *multi-stakeholder*. Diperkuat dengan pendapat Ansell dan Gash (2008) yang menyatakan bahwa dukungan dan komitmen atas kolaborasi antar *stakeholders* dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah untuk upaya mencapai tujuan.

Dalam hal ini yang ditekankan yaitu pada pengelolaan sampah terpadu di Kabupaten Cilacap yang memanfaatkan teknologi RDF dengan menerapkan konsep *waste to energy*. Dalam konteks ini, pemerintah sebagai pemangku kebijakan harus mampu mendorong dan memfasilitasi kerjasama tersebut untuk mencapai tujuan

pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan dapat menghasilkan energi terbarukan sehingga mendukung pembangunan berkelanjutan serta meminimalisir dampak negatif sampah terhadap lingkungan, kesehatan, dan sosial. Upaya pemerintah sebagai katalisator dalam menyelesaikan masalah sampah menjadi harapan publik. Dengan pendekatan proses *collaborative governance*, semua aktor dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan dan menciptakan solusi yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Proses *collaborative governance* pengelolaan sampah terpadu berbasis teknologi RDF di Kabupaten Cilacap diperlukan analisis lebih mendalam, mengingat fasilitas *governance* pengelolaan sampah terpadu berbasis teknologi RDF di Kabupaten Cilacap dipilih sebagai *pilot project* di Indonesia sehingga hasil dari penelitian ini bermanfaat untuk melakukan evaluasi atas analisis proses kolaborasi dan analisis faktor penghambat yang mempengaruhi proses kolaborasi berlangsung.

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Tipe Penelitian

Pada suatu penelitian, terdapat tiga tipe penelitian yaitu: (1) Eksploratif; (2) Deskriptif; dan (3) Eksplanatori. Penjelasan ketiga tipe penelitian menurut Singarimbun (2008) adalah sebagai berikut:

- a. Tipe Eksploratif (*Explorative Research*) adalah tipe penelitian yang bertujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang suatu fenomena atau masalah tertentu dengan merumuskan masalah secara rinci serta menyusun dugaan atau hipotesis mengenai fenomena atau masalah tersebut;

- b. Tipe Penelitian Deskriptif (*Descriptive Research*) adalah tipe penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah dengan menggambarkan dan mencoba membandingkan fenomena-fenomena yang ditemukan, melakukan klasifikasi terhadap fenomena tersebut, serta menentukan adanya hubungan terhadap gejala yang teridentifikasi;
- c. Tipe Penelitian Eksplanatori (*Explanatory Research*) adalah tipe penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis mengenai hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya berdasarkan hasil dari perumusan hipotesis yang telah ditetapkan di awal penelitian.

Berdasarkan tujuan dan permasalahan penelitian yang dikaji, peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif karena untuk menggambarkan fenomena yang terjadi pada proses *collaborative governance* pengelolaan sampah terpadu berbasis teknologi RDF di Kabupaten Cilacap. Tipe penelitian deskriptif ini juga melalui pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Farida Nugrahani (2008) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata, baik yang tertulis maupun lisan, yang berasal dari individu serta perilaku yang diamati. Peneliti menerapkan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan peristiwa dengan akurat dan berdasarkan fakta di lapangan untuk mendeskripsikan secara jelas dan rinci mengenai proses dan faktor penghambat pada proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah terpadu

berbasis teknologi RDF di Kabupaten Cilacap yang diharapkan dapat menjadi solusi konkret terhadap berbagai tantangan dalam pembangunan.

1.9.2. Situs Penelitian

Al Muchtar (2015) mendefinisikan situs penelitian adalah tempat yang dipilih untuk mempelajari objek penelitian serta mengumpulkan data atau informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian. Penentuan situs penelitian dibentuk berdasarkan berbagai faktor pertimbangan, seperti keunikan, daya tarik, dan kesesuaian dengan topik penelitian yang dipilih. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan situs penelitian ini dapat menghasilkan sesuatu yang baru dan bernilai. Penelitian ini berfokus pada proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah terpadu berbasis teknologi RDF di Kabupaten Cilacap serta faktor yang mempengaruhinya. Lokasi penelitian dipusatkan di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) *Refused Derived Fuel* (RDF) Kabupaten Cilacap dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cilacap sebagai institusi utama yang bertanggung jawab dan memfasilitasi terciptanya pengelolaan sampah berbasis RDF dengan model *collaborative governance*.

1.9.3. Subjek Penelitian

Sugiyono (2016) mendefinisikan subjek penelitian adalah individu atau pihak yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti dan berperan sebagai informan, sehingga dapat memberikan informasi yang relevan dengan data penelitian. Berdasarkan hal tersebut, subjek penelitian diharapkan memiliki kemampuan untuk memberikan informasi terkait sesuatu yang

berhubungan dengan fenomena yang diteliti. Informan adalah individu yang memiliki pengetahuan atau pengalaman mengenai suatu situasi dan kondisi tertentu serta dapat memberikan informasi yang relevan bagi penelitian yang berhubungan dengan pengelolaan sampah terpadu berbasis teknologi RDF dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah metode yang memastikan melalui penentuan identitas khusus bahwa subjek penelitian sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian diharapkan dapat menanggapi kasus dengan baik karena apabila informan memahami subjek penelitian yang sedang diteliti maka informasi yang didapatkan hasilnya akan sesuai dengan kriteria penelitian. Sugiyono (2010) berpendapat bahwa untuk membuat data yang lebih representatif dapat menggunakan teknik sampel penelitian *purposive sampling* karena teknik tersebut mempertimbangkan faktor-faktor tertentu sesuai dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik bola salju (*snowball sampling*) dimana peneliti memulai dengan sejumlah kecil kontak awal (benih) yang memenuhi kriteria penelitian. Peserta ini kemudian merujuk orang lain, menciptakan rantai rujukan (Gierczyk et al., 2024). Adapun informan dalam penelitian ini adalah *stakeholders* yang terlibat dalam tata kelola kolaboratif pengelolaan sampah terpadu berbasis teknologi RDF dan beberapa perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cilacap selaku *leading sector*. Adapun pihak pemangku kepentingan yang menjadi subjek awal dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1.7. sebagai berikut:

Tabel 1.7. Daftar Informan

No	Aktor	Asal Instansi
1.	Pemerintah	Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
		Staf Perencanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
		Koordinator Teknis Lapangan Operasional Pengelolaan Sampah Terpadu RDF (DLH)
		Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap
		Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Cilacap
2.	Swasta	MSW RDF Business Development Manager PT. SBI Tbk
		Koordinator Teknis Lapangan Operasional Pengelolaan Sampah Terpadu RDF (PT. SBI)
3.	Masyarakat	Paguyuban Pekerja Hijau
4.	Akademisi	Dosen Prodi Teknik Pengendalian Perencanaan Lingkungan Politeknik Negeri Cilacap
5.	Media	Jurnalis Radar Banyumas

Sumber: Hasil penentuan informan melalui metode purposive sampling, (2024)

1.9.4. Jenis Data

Sugiyono (2017) menjelaskan jenis data dapat dibagi dua, yaitu:

- a. Data Kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata, kalimat, gambar atau skema, bukan dalam bentuk angka. Jenis data ini dapat diperoleh melalui wawancara, diskusi, analisis dokumen, atau observasi yang ditulis dalam transkrip sebagaimana definisi oleh Indah dalam Adelina (2019). Penelitian mengenai proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah terpadu di Kabupaten Cilacap terkait dengan data yang dikumpulkan juga dipresentasikan dalam bentuk kalimat, skema, gambar yang didasarkan pada data yang telah dikumpulkan oleh peneliti.

- b. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka atau data yang dapat diukur. Data ini diperoleh melalui dokumentasi laporan kegiatan, data statistik dari instansi terkait, serta hasil pengamatan langsung terhadap sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis RDF di Kabupaten Cilacap. Dalam konteks penelitian ini, data kuantitatif digunakan untuk mendeskripsikan berbagai aspek empiris yang mendukung analisis proses *collaborative governance*. Meskipun data kuantitatif tidak diolah secara statistik dalam penelitian ini, penggunaannya tetap relevan sebagai bahan pendukung untuk memperkuat temuan kualitatif terkait pola kerjasama antar aktor dalam proses *collaborative governance*.

1.9.5. Sumber Data

Edi Riyadi (2016) mendefinisikan sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi terkait data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis sumber data yang digunakan, yaitu:

- a. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, seperti melalui wawancara, survei individu atau kelompok, serta hasil observasi terhadap objek, peristiwa, atau hasil pengujian. Berdasarkan hal tersebut, sumber data utama dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan observasi. Adapun yang menjadi sumber data primer, yaitu wawancara dengan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap, PT SBI Kabupaten Cilacap, paguyuban pekerja hijau sebagai perwakilan dari unsur

masyarakat, akademisi, dan media. Sumber data utama lainnya peneliti melakukan observasi di DLH Kabupaten Cilacap selaku *leading sector* dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah terpadu guna mengamati kegiatan dan proses perwujudan proses kolaborasi pengelolaan sampah terpadu berbasis teknologi RDF di Kabupaten Cilacap.

- b. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara, seperti buku, catatan, dokumen, bukti yang telah ada, atau arsip, baik yang telah dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara luas. Dalam penelitian ini, data sekunder berguna untuk melengkapi informasi yang sudah diperoleh melalui hasil wawancara.

1.9.6. Teknik Pengumpulan Data

Akdon dan Ridwan (2010) mendefinisikan teknik pengumpulan data adalah prosedur atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai berikut:

- a. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati serta mencatat keadaan atau perilaku objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi langsung terhadap fakta dan fenomena yang terjadi di lapangan untuk memperoleh data yang akurat (Hardani et.al., 2020). Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengumpulkan data mengenai bentuk

kerjasama yang telah terjalin serta berbagai kegiatan yang mendukung implementasi pengelolaan sampah terpadu berbasis teknologi RDF dalam konteks *collaborative governance*. Observasi mencakup pengamatan terhadap dialog tatap muka antara aktor-aktor yang terlibat dalam kolaborasi, pemantauan rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap pada waktu tertentu, serta pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas di lingkungan pengelolaan sampah terpadu berbasis teknologi RDF Kabupaten Cilacap.

- b. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan informan. Dalam penelitian ini, wawancara dibedakan menjadi dua jenis, yaitu wawancara tak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tak terstruktur, yang juga dikenal sebagai wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, atau wawancara terbuka, memungkinkan informan memberikan jawaban secara bebas tanpa batasan format tertentu. Wawancara terstruktur atau wawancara baku menggunakan daftar pertanyaan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan pilihan jawaban yang telah ditentukan (Hardani et al., 2020). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur dengan memanfaatkan *interview guide* sebagai pedoman wawancara. Pedoman ini disusun secara sistematis dan lengkap guna

memastikan bahwa data yang diperoleh dari informan relevan, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

- c. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti buku, internet, majalah, surat kabar, serta dokumen lain yang relevan. Tahapan ini dianggap penting karena dapat berfungsi sebagai bukti pendukung yang memperkuat hasil penelitian serta mendukung gagasan yang dikembangkan dalam upaya memecahkan masalah penelitian (Hardani et al., 2020). Dalam penelitian ini, dokumentasi yang diperlukan mencakup foto-foto kegiatan serta dokumen pendukung seperti hasil rapat evaluasi, diskusi, koordinasi, kegiatan operasional pengelolaan sampah, serta laporan data terkait pengelolaan sampah RDF. Penggunaan dokumentasi ini bertujuan untuk membantu peneliti memperoleh data yang relevan dengan proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah terpadu berbasis teknologi RDF di Kabupaten Cilacap.

1.9.7. Analisis dan Interpretasi Data

Sugiyono (2018) mendefinisikan analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis, mengorganisasikannya ke dalam pola tertentu, serta menyusun kesimpulan agar dapat dipahami dengan lebih mudah, baik oleh peneliti sendiri maupun oleh pembaca lainnya. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018) menekankan bahwa analisis data memerlukan akurasi dan kecermatan karena proses ini dapat dilakukan baik sebelum maupun

setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Data yang telah dikumpulkan kemudian diinterpretasikan dengan tujuan mengidentifikasi pola atau keteraturan dalam penelitian. Tahapan analisis dan interpretasi data dalam penelitian yang berjudul Proses *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Teknologi RDF di Kabupaten Cilacap mencakup langkah-langkah berikut:

- a. Reduksi data. Sugiyono (2018) mendefinisikan reduksi data adalah tahapan dalam penelitian yang bertujuan untuk menyeleksi, menyederhanakan, dan memusatkan perhatian pada informasi utama yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini membantu menyajikan gambaran yang lebih jelas mengenai fenomena yang dikaji serta memudahkan dalam pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data adalah langkah dalam menganalisis data dengan memilah dan merangkum informasi penting agar lebih terarah dan mudah dipahami.
- b. Penyajian data. Sugiyono (2018) mendefinisikan penyajian data adalah proses menampilkan data dalam bentuk yang terstruktur agar lebih mudah dipahami. Penyajian ini dapat dilakukan melalui grafik, tabel, uraian, atau flowchart sehingga informasi tersusun dengan rapi dan sistematis. Data mengenai fenomena yang diteliti disusun dalam pola tertentu agar lebih jelas, mudah dianalisis, dan dipahami.
- c. Penarikan kesimpulan. Sugiyono (2018) mendefinisikan penarikan kesimpulan adalah proses merumuskan jawaban terhadap masalah penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Kesimpulan ini

tidak selalu sesuai dengan rumusan masalah awal karena dalam penelitian kualitatif, rumusan masalah dapat berkembang seiring dengan temuan di lapangan. Penarikan kesimpulan harus didukung oleh data yang valid dan konsisten, serta dapat berbentuk deskripsi atau gambaran suatu objek. Selain itu, kesimpulan yang diperoleh juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.9.8. Kualitas dan Validitas Data

Validitas data adalah tingkat kesesuaian antara data yang dikumpulkan dengan fakta di lapangan. Creswell dan Miller menjelaskan bahwa validitas dalam penelitian kualitatif bergantung pada seberapa akurat hasil penelitian dari perspektif peneliti, partisipan, atau pembaca secara keseluruhan. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif mencakup uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas) (Sugiyono, 2015).

Penelitian ini mengimplementasikan teknik triangulasi sumber untuk melakukan pengujian terhadap keabsahan data. Triangulasi sumber adalah uji validitas data yang dilakukan dengan memeriksa data yang didapat dari berbagai sumber yang berbeda. Teknik ini dilakukan dengan melakukan perbandingan antara hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan terhadap beberapa informan. Dalam konteks penelitian ini, seperti Dinas Lingkungan Hidup Cilacap, Paguyuban Pekerja Hijau Hijau, PT. SBI, Dosen Politeknik Negeri Cilacap, dan Jurnalis Media. Dengan membandingkan hasil pengamatan dan wawancara ini dapat memperjelas hasil temuan di lapangan.